

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara yang memiliki sistem demokrasi yang menyelenggarakan pemilu baik tingkat nasional maupun daerah adalah Indonesia. Demokrasi merupakan satu sistem yang masih dianggap terbaik untuk menjalankan suatu negara. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana rakyat memegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Pembahasan mendalam mengenai praktek demokrasi di Indonesia dan perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari pengaturan rumusan demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat dalam sejarah lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat adalah pengaturan format Negara Kesatuan Republik Indonesia. Format negara dalam konstitusi yakni pengakuan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.¹

Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan lalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai

¹ Hyronimus Rova, *Demokrasi dan Kebangsaan* (Edisi cetakan Jatinangor, Januari 2015) hlm 37

wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan Keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Demokrasi mengizinkann warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui Perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Makna demokrasi berkaitan erat dengan sistem sosial pendukungnya dan sistem politik atau rezim yang menggunakannya. Disamping mengandung unsur-unsur yang universal (*common denominator*), demokrasi juga mengandung muatan- muatan kontekstual yang melekat pada sistem sosial dan sistem politik tertentu (*cultural relativism*). Demokrasi erat kaitannya dengan sistem sosial tertentu karena demokrasi tidak hanya sekedar merujuk pada mesin politik (*political machinery*), tetapi juga mengandung pandangan hidup (*way of living*) suatu masyarakat. Pelaksanaan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik (*public policy*) yang banyak

ditentukan para pemimpin (*elite*) organisasi politik dan kelompok kepentingan (*interest group*) yang tampil secara kompetitif. Bahkan, negara yang paling otoriter sekalipun akan menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi.²

Demokrasi lokal adalah sistem pemerintahan di tingkat daerah (kota, kecamatan, desa, dan lain-lain) yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat bukan hanya menjadi objek dari keputusan pemerintah, tetapi juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan kritik.

Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintah daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.³

Pemerintahan dalam tingkat lokal atau daerah merupakan hasil dari devolusi sebagai dimensi dari pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi menerangkan dengan jelas bagaimana seharusnya pemerintahan bangsa Indonesia berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Desentralisasi juga mencerminkan bagaimana praktik dari sistem pemerintahan demokrasi yang berjalan di Indonesia, dimana partisipasi rakyat dalam politik dimungkinkan, rakyat diberikan hak untuk berekspresi bahkan bisa ikut serta dalam menjadi aktor politik.

² Samsudin, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi* (Diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Bogor September 2020) hlm 3

³ Deden Faturahman, "Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia", *Jurnal Legality*, Vol 12, Nomor 1, 2005.

Politik lokal dapat dipahami sebagai implementasi dari desentralisasi dan otonomi daerah, yang dimana dua konsep ini memiliki arti yang berbeda, otonomi diartikan sebagai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aspirasi masyarakat, juga merupakan alat pertahanan yang berkesinambungan bagi demokrasi. Otonomi daerah bisa dipahami sebagai pendorong berhasilnya atau tidaknya sebuah negara dalam mengisi kemerdekaannya. Dengan arti bahwa otonomi daerah dalam politik lokal dinilai sebagai sebuah mekanisme yang memungkinkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan apapun secara luas untuk memajukan bangsa melalui pengelolaan daerah secara mandiri.⁴

Dilihat dari sisi tingkatan, politik lokal dibagi menjadi tiga bagian yaitu politik global, nasional dan lokal. Politik global membahas masalah politik tingkat dunia yang melibatkan antar negara, dalam satu benua atau lebih untuk membicarakan masalah dan kepentingan bersama. Politik nasional merupakan level politik tingkat negara dengan isu pokok perpolitikan di level nasional. Sementara politik lokal menyangkut masalah dan isu politik di tingkat lokal, baik pada level provinsi maupun Kabupaten/Kota, atau bahkan di level desa sekalipun. Kata politik lokal menunjuk pada persoalan dan isu politik di level yang lebih terbatas, dan menyangkut persoalan yang berkembang di tingkat lokal. Meskipun politik lokal berada pada level yang terendah, namun semua isu politik, baik global maupun nasional berawal dari lokal. Isu dan aktor berawal dari lokal, merembet menjadi isu nasional dan bahkan menjadi isu global.

⁴ Wahyu Trisno Aji, "Politik Lokal: Tinjauan Systematic Literature Review," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 415–29, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1805>.

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu cara ekspresi demokrasi Indonesia. Pemilih memilih calon pejabat politik tertentu melalui pemilu. Presiden berada pada posisi teratas dalam hierarki politik, sedangkan kepala desa berada pada posisi paling bawah. Adapun luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) merupakan asa yang digunakan dalam pemilihan umum di Indonesia.⁵

Langsung, bahwa pemilih memilih wakilnya secara langsung. Umum, bahwa seluruh warga negara yang sudah mempunyai hak pilih punya kesempatan yang sama untuk terdaftar sebagai pemilih. Bebas, bahwa pemilih berhak memilih secara bebas berdasarkan keputusan sendiri. Rahasia, bahwa pemilih dijamin dan dilindungi. kerahasiaan pilihannya. Jujur, bahwa penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau, pemilih dan semua pihak berperilaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil, bahwa setiap pemilih memiliki satu suara secara adil dan bebas dari kecurangan. Prinsip ini bersifat universal, yakni disebut demokratis apabila pemilu itu dijalankan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Salah satu indikasi bahwa masyarakat Indonesia telah menganut praktik demokrasi adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum di semua tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Masyarakat memanfaatkan hak dan kebebasannya sebagai warga negara untuk menyuarakan gagasannya di muka umum dan mengambil keputusan sendiri melalui pemilihan umum. Setiap individu berhak atas kebebasan berpendapat, yang dilindungi oleh pemerintah. Setiap orang

⁵ Tengku Syarifuddin, Erwin Resmawan, and Iman Surya, "Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016," *Pemerintahan Integratif* 7, no. 1 (2019): 52–61, [https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2019/01/pin_tengku \(01-24-19-01-18-46\).pdf](https://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2019/01/pin_tengku (01-24-19-01-18-46).pdf).

berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi, sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Penafsiran pasal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat secara tertulis, lisan, dan cara lain secara bertanggung jawab dan terbuka dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dan diatur oleh hukum negara. Beberapa aturan di atas menyoroti fakta bahwa negara melindungi dan menjamin hak atas kebebasan berpendapat sebagai aspek penting dalam kehidupan. Kebebasan berekspresi dapat diungkapkan melalui tulisan, novel, percakapan, atau kegiatan jurnalistik. Terlepas dari tindakan publik yang dilakukan pemerintah atau lembaga negara lainnya, setiap warga negara berhak untuk secara bebas menyatakan siapa dirinya.⁶

Kelompok masyarakat adat yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan desa sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah. Pemerintah daerah terdiri dari serangkaian lembaga dan prinsip pemerintahan yang telah berkembang selama beberapa generasi. Desa dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan resmi yang terdesentralisasi setelah Indonesia merdeka. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menetapkan desa sebagai wilayah administratif di bawah kecamatan. Selanjutnya pemerintahan desa dimasukkan ke dalam pemerintahan daerah dan diatur dengan peraturan pemerintahan daerah, khususnya Undang-Undang Nomor

⁶ Ersu Kusuma, "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 03 (2023): 97–101, <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, maka peraturan-peraturan yang berkaitan dengan desa sekali lagi terisolasi dari mereka yang mengatur pemerintahan daerah.⁷

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan dan melaksanakan perubahan UU Desa pada tanggal 25 April 2024. UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan aturan yang tertera di dalam UU tersebut, secara khusus, Pasal 39 menjelaskan peraturan mengenai masa jabatan kepala desa dimana kepala desa (kades) dapat menjabat hingga dua periode, yang masing-masing berlangsung selama delapan tahun.⁸

Berdasarkan Pasal 39 ayat 1, kepala desa menjabat selama delapan tahun sejak dilantik. Kemudian, setiap kepala desa dapat menjabat paling lama dua periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, sesuai Pasal 39 ayat 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa telah berkembang menjadi suatu prosedur politik yang hampir menjangkau setiap masyarakat desa.

⁷ Agus Kusnadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 564–80, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>.

⁸<https://www.sungaiular.web.id/warta/baca-artikel.php?id=10#:~:text=Jakarta%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20>

Ada dua komponen yang membentuk sistem pemerintahan desa di Indonesia: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa). Desa wajib menyelenggarakan dan menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Pemerintahan Desa dapat terus melaksanakan, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan demokrasi di desa. Karena Pemilihan Kepala Desa merupakan wadah untuk menggunakan hak memilih dan kebebasan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan pribadi, para calon harus menggunakan taktik untuk memenangkan hati masyarakat. Untuk memenangkan pemilihan kepala desa, strategi dapat dilakukan melalui komunikasi dan cara untuk memenangkan hati masyarakat.⁹

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berfungsi pada tingkat terkecil pemerintahan yaitu desa, Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu contoh pelaksanaan Otonomi Daerah. Ada beberapa calon yang bersaing memperebutkan posisi teratas desa setiap kali dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa. Meski begitu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah mengatur semuanya. Setiap pasal peraturan pemerintah tersebut memuat uraian tentang seluruh pedoman dan syarat-syarat pencalonan.¹⁰

⁹ Beni Akhmad Masbah Hilaliah, Fakhriannor, "Strategi Pemenangan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2021," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2021): 2–7.

Pemimpin lokal adalah seseorang yang memiliki pengaruh dan peran penting dalam suatu komunitas atau wilayah tertentu, baik secara formal maupun informal. Mereka dapat menjadi pemimpin formal seperti kepala desa atau wali kota, atau pemimpin informal seperti tokoh masyarakat atau pemimpin kelompok. Dari perspektif organisasi tradisional, kepemimpinan adalah memengaruhi seseorang atau memberdayakan seseorang atau yang memiliki pengikut. Dengan melakukan itu, seseorang dapat menerjemahkan visi apa pun menjadi kenyataan dengan memaksimalkan upaya lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan lokal adalah semua ini tetapi dalam konteks lokal mana pun. Jika tidak ada pemimpin di suatu daerah, maka tidak ada seorang pun yang dapat berbicara atas nama masyarakat setempat.

Banyak masyarakat lokal menghadapi berbagai jenis tantangan karena perubahan ekonomi, iklim, populasi, kebijakan pemerintah. Beberapa orang di masyarakat tersebut memainkan peran penting dalam menavigasi tantangan-tantangan yang muncul dari waktu ke waktu atau memengaruhi masyarakat setempat untuk bekerja sama demi masyarakat. Pemimpin lokal yang tinggal di dalam masyarakat benar-benar peduli untuk membantu masyarakat setempat. Sehubungan dengan memengaruhi masyarakat setempat, mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap hal itu. Calon pemimpin daerah adalah pejabat instansi pemerintah daerah, kepala desa, tokoh agama, tokoh usaha, birokrat daerah, pimpinan partai politik, dan lain-lain.

¹⁰ Syarifuddin, Resmawan, and Surya, "Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016."

Demikian pula dengan pemilihan kepala desa pada Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi, yang mengikuti mekanisme pemilihan kepala desa yang berlaku. Terdapat beberapa calon yang sudah terpilih tentunya dan memenuhi syarat pemilihan kepala desa sebagaimana mestinya, pemilihan serentak dilakukan dan dirancang sesuai ketentuan ini Dimana keberlangsungannya melibatkan berbagai perangkat desa. Kelancaran ini tidak luput dari banyaknya partisipasi masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya tanpa adanya paksaan dan kecurangan.

Tabel 1. 1 Perolehan Suara Pada Tahun 2008

Nama Calon	Perolehan Suara
Musyadi	106
Iskandar Muhammad Yunus	360

Daftar Pemilih Tetap (DPT) = 557

Tabel 1. 2 Perolehan Suara Pada Tahun 2016

Nama Calon	Perolehan Suara
Hermansyah	205
Iskandar Muhammad Yunus	312
Susilawati	6

Daftar Pemilih Tetap (DPT): 628

Tabel 1. 3 Perolehan Suara Pada Tahun 2022

Nama Calon	Perolehan Suara
Ahmad Pauzi	37
Iskandar Muhammad Yunus	548

Daftar Pemilih Tetap (DPT): 672

Dari tabel diatas, Pada Pemilihan kepala desa di Danau Kedap dapat dilihat juga bahwa masih ada masyarakat yang melakukan golongan putih (Golput) dan tidak menggunakan hak suaranya dengan benar. Dari pemilihan 2008 terlihat sebanyak 91 orang yang tidak menggunakan hak suaranya. Pada pemilihan 2016

terdapat 105 orang yang melakukan golput, dan pada pemilihan 2022 terdapat pula 87 orang yang sama melakukan golput dan tidak menggunakan hak pilihnya.¹¹

Dari perolehan suara pada pemilihan kepala desa di Desa Danau Kedap terlihat jelas bahwa pada pemilihan kepala desa tersebut yang sangat mencolok yaitu Iskandar Muhammad Yunus. Dari pemilihan 2008-2016-2022 beliau selalu memimpin dengan perolehan suara yang cukup jauh dibandingkan calon lainnya. Hal ini membuat Iskandar Muhammad Yunus selalu memenangkan pilkades secara berturut-turut selama tiga periode. Pada periode pertama 2008 menjabat selama 5 tahun, periode kedua 2016 menjabat selama 6 tahun dan pada periode ketiga 2022 menjabat selama 6 tahun dan ditambah 2 tahun sehingga pada periode ketiga Iskandar Muhammad Yunus menjabat selama 8 tahun. Pada tahun 2022 inilah tahun periode ketiga beliau yang memenangkan dengan suara 548 dari 672 perbandingan yang sangat jauh disetiap periode yang mana periode ketiga membuatnya sangat unggul dan terpercaya melalui bukti nyata pada periode sebelumnya.

Tabel 1. 4 Daftar Nama Desa Kecamatan Maro Sebo

No	Kode Pos	Desa. Kelurahan
1	36382	Bakung
2	36382	Baru
3	36382	Danau Kedap
4	36382	Danau Lamo
5	36382	Jambi Kecil
6	36382	Jambi Kulo/Tulo
7	36382	Lubuk Raman
8	36382	Muara/Muaro Jambi
9	36382	Mudung Darat
10	36382	Niaso
11	36382	Setiris
12	36382	Tanjung Katung

¹¹ Zulkarnain, Wawancara Bersama sekretaris desa dan perangkat desa 08 oktober 2024.

Dari tabel diatas, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki 12 desa atau kelurahan yang mana setiap desa memilih kepala desa yang menjadi pimpinan disetiap desa. Namun, menurut informasi yang peneliti dapatkan bahwa hanya Desa Danau Kedap yang kepala desa nya memenangkan pilkades selama tiga periode berturut-turut.

Dalam memperkuat landasan ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan akan menjadi acuan referensi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu menggunakan dua artikel yang relevan untuk mengetahui terkait strategi kemenangan dalam pemilihan kepala desa.

Pertama yang berjudul ” Strategi Kemenangan Dalam Pemilihan Kepala Desa Selama Tiga Periode Di Desa Sekarputih Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik” yang ditulis oleh Adam Surya Saputra dengan kesimpulan: bahwa pada Kemenangan proses pemilihan kepala desa 2007 hingga 2019 di Desa Sekarputih dimenangkan oleh bapak Syamsudin. Berdasarkan penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi kasus ini, didapatkan bahwa calon Syamsudin menggunakan taktik berikut pada pemilihan kepala desa tahun 2007: membentuk tim sukses, bertemu dengan tetua desa, membentuk kelompok diskusi (think tank), mengumpulkan data lingkungan hidup, dan kemudian memanfaatkan modalitas politik. Perundingan dengan pimpinan Muhammadiyah, pembangunan sarana ibadah, dukungan dana, pemanfaatan layanan kyia, dan terakhir pemanfaatan modalitas politik merupakan langkah-langkah yang dilakukan pada

tahun 2013. Strategi pemilihan kepala desa putaran terakhir selanjutnya meliputi prosedur pemilihan, pencarian fakta, dan perumusan misi.¹²

Kedua, penelitian yang berjudul “Kemenangan Hatrick: Strategi Keterpilihan Een Rusmiyati dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Cirebon” yang ditulis oleh Ahmad muzadi. Keberhasilan Partai Hanura, salah satu partai kecil di Kota Cirebon, dalam pemilu legislatif, ketika Een Rusmiyati terpilih kembali untuk ketiga kalinya sebagai anggota perempuan DPRD Kota Cirebon, menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan strategi politik Sheth dan Frazier serta teori representasi politik Vieira dan Runciman sebagai instrumen untuk menjelaskan terpilihnya kembali petahana Een Rusmiyati pada pemilu 2019. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara.¹³

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu di atas, dimana penelitian terdahulu memiliki kesamaan yang membahas terkait strategi kemenangan dalam pemilihan tiga periode namun memiliki fokus kajian yang berbeda dimana peneliti *pertama* terkait strategi pembentukan tim sukses, riset lingkungan serta modalitas politik, adapun Peneliti kedua menggunakan strategi politik Sheth dan Frazier serta teori representasi politik Vieira dan Runciman sebagai instrumen untuk menjelaskan alasan terpilihnya Een Rusmiyati.

¹² Adam Surya Saputra, “Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Kepala Desa Selama Tiga Periode Di Desa Sekarputih Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik,” *Jurnal Politique* 3, no. 1 (2023): 85–96, <https://doi.org/10.15642/politique.2023.3.1.85-96>.

¹³ Akhmad Muzadi and Fitriyah Fitriyah, “Kemenangan Hatrick: Strategi Keterpilihan Een Rusmiyati Dalam Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Cirebon,” *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 118–33, <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8146>.

Namun demikian, meskipun kedua penelitian tersebut telah memberikan wawasan yang mendalam, belum ada penelitian yang komprehensif dengan penelitian yang ingin dibahas, dimana penelitian yang dibahas ingin memfokus dan mengetahui apa yang menjadikan strategi pemenangan dengan perolehan suara yang mencolok selama tiga periode. Di sinilah letak kebaruan dan urgensi penelitian ini, dengan demikian penelitian ini tidak hanya melengkapi hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, tetapi juga memperkenalkan pendekatan baru yang akan menjadi kemenangan pada pemilihan yang akan datang. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terkait apa yang menjadi dasar strategi pemenangan pilkades. Sehingga peneliti mengangkat judul **“Strategi Pemenangan Iskandar Muhammad Yunus Dalam Pemilihan Kepala Desa Periode Ketiga Tahun 2022 (Studi Di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi).**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dari itu peneliti memaparkan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

Bagaimana strategi yang dilakukan Iskandar Muhammad Yunus dalam pemenangan pemilihan kepala desa di desa danau kedap secara berturut turut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Iskandar Muhammad Yunus dalam pemenangan pemilihan kepala desa di desa danau kedap secara berturut turut.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan sebagai referensi dan memperkaya wawasan cakrawala serta dapat menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan terkhusus terkait startegi kemenangan. Selain itu, dapat digunakan untuk dijadikan acuan untuk dikembangkan menjadi lebih baik dalam hal teori atau kajian yang mendalam terkait strategi pemenangan dalam pemilihan kepala desa pada fokus kajian masing-masing.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam membantu dan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang terkait baik itu masyarakat, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi diharapkan hasil peneliti ini dapat menjadi masukan ilmu pengetahuan dan informasi.

1.5 Landasan Teori

Dalam menganalisis masalah yang ditemukan di lapangan, teori menjadi kunci yang penting bagi peneliti. Berikut adalah teori yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah yang ada dilapangan.

Teori Strategi Politik

a. Pengertian Strategi

Kata Yunani “stratego”, yang bermakna perencanaan atau penghancuran melalui efisiensi penggunaan sumber daya merupakan asal mula kata “strategis”. Menurut David Easton, strategi adalah alat yang bertujuan untuk mencapai cita-cita

jangka panjang dan kemungkinan perlakuan yang memerlukan banyak sumber daya atau kelompok serta berbagai jenis keputusan manajemen.

Pearce dan Robinson, di sisi lain, mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif yang berfokus pada masa depan dan bertujuan untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan yang berbeda untuk meraih tujuan tertentu dalam domain perusahaan atau organisasi.

Meskipun kegunaannya berbeda-beda tergantung pada jenis bisnis/badan yang menggunakannya, strategi pada dasarnya adalah alat yang berfungsi sebagai penggerak dan akselerator dalam efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Akibatnya, ini digunakan oleh hampir semua jenis organisasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan strategi sebagai “Rencana yang matang mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.” Menurut Arifin, strategi adalah jumlah penilaian kondisional yang dibuat pada saat tindakan akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan.¹⁴

b. Strategi Politik

Awalnya digunakan dalam lingkungan militer, strategi kini telah dipahami dengan lebih baik, yang mengarah pada pengembangan strategi manajerial yang memudahkan pengelolaan personel di dalam perusahaan. Setelah itu, gagasan strategi secara bertahap menyebar ke bidang masyarakat lainnya, seperti politik. Politik berupaya memandu sebagian besar masyarakat atau anggota partai dan organisasi politik menuju tujuan tertentu.

¹⁴ Dr. Anang Anas Azhar, M.A. “Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Memperebut Simpati Masyarakat (Edisi Cetakan Pertama),(Yogyakarta Januari 2017), hlm 109

Strategi politik, menurut Martin Anderson, adalah suatu seni yang melibatkan kapasitas akal dan pikiran untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan dengan cara mengoptimalkan dan memperoleh keuntungan secara efektif.

c. Strategi Politik Peter Schorder

Strategi politik adalah rencana untuk mencapai tujuan politik. Penerapan inisiatif desentralisasi, privatisasi, atau deregulasi, pembentukan struktur administratif baru, atau penerapan undang-undang baru adalah beberapa contohnya. Pengalaman menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun partai politik tidak merencanakan tindakan tersebut secara rinci. Jumlah usaha yang gagal akan sangat kecil jika hal ini tidak terjadi. Strategi politik suatu partai politik sangatlah penting; tanpanya, proyek-proyek besar atau perubahan jangka panjang tidak dapat dilaksanakan. Peter Schorder membedakan dua komponen strategi politik yakni strategi ofensif dan strategi defensif untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan.¹⁵

1) Strategi *ofensif* (Menyerang)

Jika seorang eksekutif ingin melaksanakan suatu proyek atau sebuah partai ingin meningkatkan basis suaranya, pendekatan ofensif selalu diperlukan. Di kedua kondisi tersebut, Keberhasilan kampanye diperoleh apabila terbangunnya opini positif masyarakat terhadap partai. Strategi perluasan pasar dan menembus pasar adalah dua bentuk kategori taktik ofensif.

¹⁵ Peter Schorder, *Strategi Politik* (Edisi Cetakan Ketiga Maret 2010) hlm 233-234

a) Strategi perluasan pangsa pasar

Tujuan dari strategi perluasan pangsa pasar selama kampanye pemilu adalah untuk menciptakan kelompok pemilih baru selain basis pemilih inti (tradisional) yang ada saat ini. Oleh karena itu, para pemilih yang telah memilih partai lawan harus diberikan penawaran yang segar atau lebih baik. Oleh karena itu, dalam hal ini yang dibahas adalah pendekatan kompetisi sejati, di mana beberapa pihak bersaing untuk mendapatkan segmen pemilih tertentu. Ketika kebijakan diterapkan, keuntungan atau profit dari kebijakan baru itulah yang dapat disebut sebagai produk yang ditawarkan dalam proses pemilu, itu harus dipromosikan. Oleh karena itu, langkah pertama adalah menguraikan kebijakan secara eksplisit. Kebijakan/polis yang belum lengkap sama tidak menggugahnya dengan produk yang tidak rampung. Karena produk dan manfaatnya tidak didefinisikan dengan baik sehingga tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum, para eksekutif sering kali membuat kesalahan. Oleh karena itu, pekerjaan hubungan masyarakat yang memadai harus dilakukan sebelum implementasi. Jika tidak, maka ada kemungkinan proyek tersebut akan diserang dan dicurigai.

b) Strategi menembus pangsa pasar

Strategi menembus pangsa pasar berfokus pada memaksimalkan potensi yang sudah ada atau memanfaatkan pangsa pasar yang dimiliki kelompok sasaran ketika keberhasilan telah dicapai, daripada mencoba memenangkan suara lawan atau masyarakat yang sebelumnya tidak begitu aktif dengan tawaran baru yang lebih baik. Misalnya, meningkatkan kinerja

kelompok sasaran (misalnya, dari 30% menjadi 50%) dapat menjadi tujuan yang mungkin dicapai. Hal ini berarti memberikan tekanan yang lebih besar pada populasi sasaran, meningkatkan pemasaran program, dan memperkuat keselarasan program-individu.¹⁶

2) Strategi Defensif (Bertahan)

Jika partai yang berkuasa, atau koalisi pemerintah yang terdiri dari banyak partai, ingin mempertahankan mayoritas atau pangsa pasarnya, strategi defensif akan muncul. Selain itu, jika suatu pasar akan ditutup atau tidak lagi dipertahankan dan penutupan pasar tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan tertinggi, maka strategi defensif juga dapat muncul. Strategi retensi atau mempertahankan pasar dan strategi divestasi atau pelepasan pasar adalah dua kategori taktik defensif.

a) Strategi mempertahankan pangsa pasar

Pemerintah sering menggunakan taktik ini untuk mempertahankan mayoritasnya. Partai yang berkuasa akan membina pendukung setianya dan berupaya memperkuat ikatan dengan pemilih musiman yang pernah mendukung mereka. Partai yang berkuasa akan berusaha mengaburkan perbedaan yang ada dan menjadikannya tidak dapat diidentifikasi sebagai pembalasan terhadap pihak lawan. Pada akhirnya, berbagai macam taktik akan digunakan, salah satunya dikenal sebagai strategi disinformasi.

b) Strategi melepas atau menyerahkan pangsa pasar

¹⁶ *Ibid*, hlm 238

Ada dua definisi untuk strategi melepas pasar. Yang pertama, suatu partai pada awalnya ingin menyerah dan, dalam beberapa kasus, bergabung dengan partai lain. Namun, tidak banyak kasus seperti ini. Dalam pemilu dengan surat suara, hanya kandidat yang paling tangguh dari putaran pertama yang maju ke pemungutan suara putaran kedua. Adapun alasan kedua, merupakan praktik yang lazim untuk mengalihkan suara pasar kepada pihak ketiga untuk sementara waktu (pemecahan suara).¹⁷

3) Tahap tahap strategi politik

a) Perumusan

1. Menjelaskan tahap pertama dari faktor yang mencakup analisis intern ataupun ekstern dengan menetapkan visi misi perencanaan dan yang menjadi tujuan strategi.
2. Perumusan strategi, secara keseluruhan, hal ini juga harus memberikan peluang untuk menciptakan varian sehingga lawan tidak dapat meramalkan atau mengantisipasi strategi yang dirancang. Lawan harus terkejut dengan kejadian-kejadian "kebetulan" yang telah diatur sebelumnya dan menjadi tidak yakin atau tidak percaya diri., hal ini membuat kini bisa mencapai tujuan tersebut.

3. Penentuan target *image* (citra yang diinginkan)

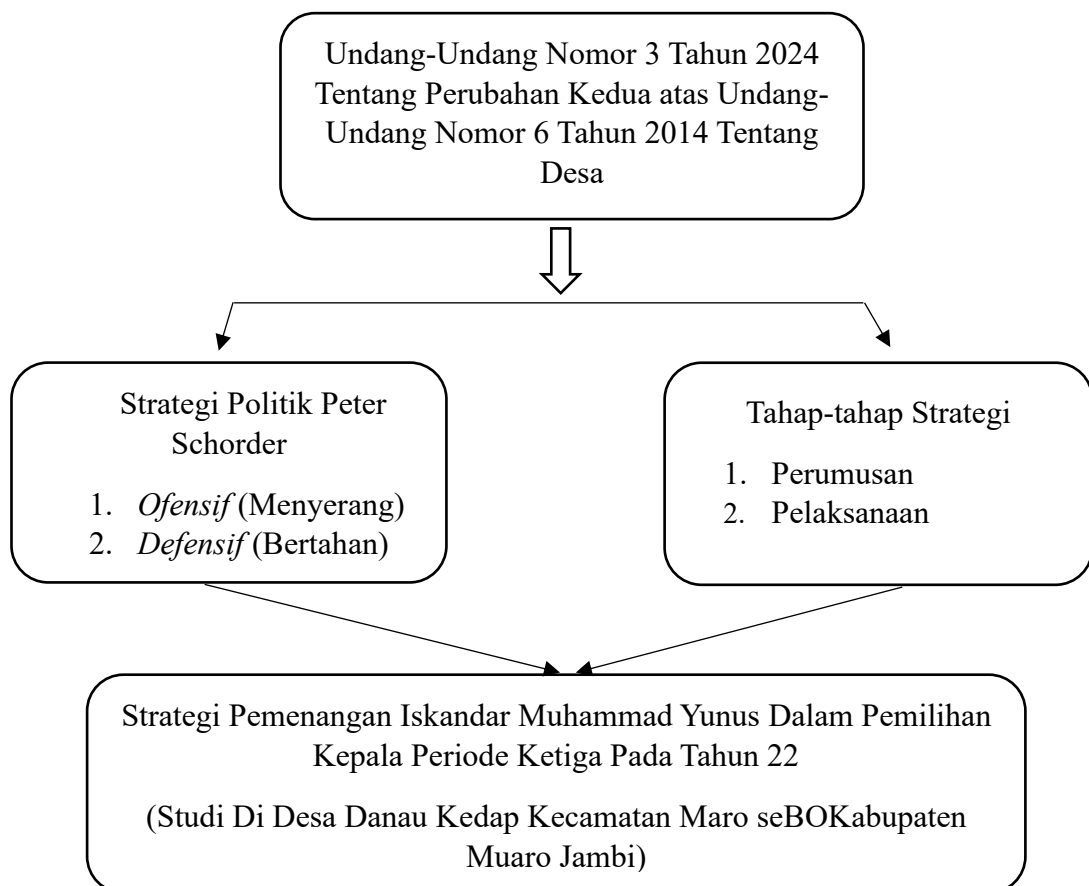
Hal ini dilakukan oleh bagian kehumasan dengan tujuan menyebarkan citra sasaran dan menanamkannya serta menyebarluaskan dalam kesadaran khalayak sasaran.

¹⁷ *Ibid*, hlm 240

b) Pelaksanaan

Proses penerapan kebijakan dan strategi melalui pengembangan program anggaran, pengembangan struktur, dan proses implementasi dikenal sebagai implementasi strategi. Aspek yang paling menantang dari proses strategis adalah implementasi strategi karena terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan pemikiran awal. Sebuah strategi yang efektif membutuhkan dukungan dari para pemimpin yang cerdas yang menyadari keadaan dan persyaratan agar strategi tersebut berhasil dilaksanakan.

1.6 Kerangka Pikir



Gambar 1. 1

Kerangka Pikir

Kerangka di atas menjelaskan Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan dalam rangka implementasi langsung demokrasi di tingkat lokal dalam pemerintahan Indonesia saat ini. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih calon yang disukainya dalam pemilihan kepala desa secara langsung. Masyarakat akan lebih bebas mengambil keputusan berdasarkan hati nuraninya tanpa tekanan dari luar.

Dalam menentukan tahap-tahapan strategi terlebih dahulu merencanakan sesuai perumusan dan pelaksanaan. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan strategi *Ofensif*, *Defensif*.

1.7 Metode Penelitian

Pada hakikatnya, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data untuk aplikasi tertentu. Penelitian menghasilkan data empiris (observasi) yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk validitas. Adapun derajat ketepatan antara data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dengan data yang benar-benar terjadi pada objek disebut validitas.¹⁸

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengkarakterisasi fakta, ciri-ciri, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara akurat, metodis, dan faktual.

Data yang mendalam dan bermakna diperoleh dengan metode kualitatif. Data yang sebenarnya serta spesifik yang mengungkapkan nilai yang tersembunyi di

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 2

dalam data yang tampak itulah yang memberi makna pada data. Maka dari itu, makna lebih diutamakan daripada generalisasi dalam penelitian kualitatif.¹⁹

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, dengan alasan bahwa Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo ini yang merupakan Lokasi pemenangan Iskandar Muhammad Yunus dalam pilkades.

1.7.3 Fokus Penelitian

Satu atau sejumlah domain terkait dari suatu konteks sosial dapat menjadi fokus suatu penelitian. Fokus proposal dalam penelitian kualitatif sebagian besar ditentukan oleh keunikan atau kebaharuan data yang akan dipetik dari konteks sosial. Fokus penelitian adalah pokok pembahasan yang dijadikan tujuan dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini, fokus permasalahannya yaitu terkait Strategi Pemenangan Iskandar Muhammad Yunus Dalam Pemilihan Kepala Desa Periode Ketiga Pada Tahun 2022.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari responden atau narasumber yang telah dipilih oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Istilah "data primer" mengarah kepada data langsung atau informasi yang diberikan secara langsung kepada pengumpul data. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat dipercaya,

¹⁹ *Ibid*, hlm 9

responden diwawancarai secara langsung. Iskandar Muhammad Yunus, dan masyarakat Desa Danau Kedap menjadi sumber data utama penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari sumber selain data primer itu sendiri, seperti individu atau dokumen lain. Data sekunder yang terdapat dalam buku, publikasi penelitian sebelumnya, atau website yang berkaitan dengan topik penelitian juga berperan sebagai informasi pendukung untuk membantu proses penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, proses mengidentifikasi informan mengharuskan peneliti memasuki konteks sosial tertentu dan mewawancarai serta mengamati individu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang konteks tersebut. Secara *purposive*, sumber data dari orang-orang yang diwawancarai diidentifikasi. *Purposive sampling* merupakan metode penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini. Cara pemilihan sumber data menurut kriteria tertentu disebut *purposive sampling*. Faktor-faktor khusus ini, salah satunya yakni masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang informasi yang dibutuhkan atau orang yang mungkin memegang posisi berkuasa, memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi konteks sosial yang diteliti.²⁰

Maka informan yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

²⁰ *Ibid*, hlm 216-218

Tabel 1. 5 Daftar Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	Iskandar Muhammad Yunus	Kepala Desa
2	Zulkarnain	Sekretaris Desa
3	Drs. Samanuddin. M	Ketua BPD
4	Rusli	Wakil BPD
5	Rini Sanderiani	Bendahara Sekretaris BPD
6	Agustian, Si Endri	Anggota BPD
7	M. Saman. Ks	Tokoh Adat
8	Ismail	Tokoh Adat
9	Adi Saputra	Tokoh Adat
10	Hijrah Saputra	Tokoh Adat
11	Husin	Tokoh Adat
12	M. Safii	Ketua Pemuda
13	Hermansyah	Tokoh Masyarakat
14	Leni Marlina	Tokoh Masyarakat

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian, sehingga prosedur pengumpulan data merupakan tahapan yang paling strategis dalam proses. Jika peneliti tidak tahu cara mengumpulkan data, mereka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.²¹

Dalam penelitian ini, digunakan tiga langkah sebagai teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan di mana pewawancara dan orang yang diwawancarai bertukar pikiran dan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan untuk menciptakan makna seputar subjek tertentu. Peneliti

²¹ *Ibid*, hlm 224

memanfaatkan wawancara sebagai metode pengumpulan data ketika mereka ingin melakukan penyelidikan awal untuk menentukan permasalahan mana yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, serta ketika mereka ingin lebih memahami sudut pandang responden. Ada dua metode untuk melakukan wawancara: sistematis dan tak sistematis. Secara sistematis menunjukkan bahwa peneliti mempersiapkan alat wawancara sebelum melakukan wawancara. Sedangkan untuk wawancara tidak sistematis, tanpa merencanakan panduan wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung.²²

b. Dokumentasi

Catatan peristiwa yang telah terjadi disebut dokumen. Dokumen dapat berupa kata-kata tertulis, gambar, atau kreasi penting seseorang. Peraturan, kebijakan, biografi, cerita, sejarah hidup, dan buku harian adalah contoh catatan tertulis. Dokumen yang berbasis visual antara lain sketsa, foto, gambar bergerak. Lukisan, patung, film, dan bentuk seni lainnya merupakan contoh dokumen berbasis karya. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan teknik observasi dan wawancara dilengkapi dengan studi dokumen.

Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini seperti pedoman wawancara, foto-foto serta rekaman suara masing-masing informan yang telah ditentukan.

²² *Ibid*, hlm 231

1.7.7 Teknik Analisis Data

Proses pencarian data, menyusun data hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan dokumentasi secara metadis, mengkategorikan, membagi, mensintesis, dan menyusun ke dalam pola, memilih apa yang penting dan akan diteliti, begitu juga proses penarikan kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain merupakan bentuk teknik analisis data. Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya didasarkan pada data yang dikumpulkan kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengelolaan data adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah prosedur sensitif yang memerlukan kecerdasan tingkat tinggi serta pengetahuan mendalam. Pemahaman peneliti akan tumbuh sebagai hasil dari percakapan tersebut, memungkinkan mereka menyaring data dengan penemuan penting dan kemajuan teoritis.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, diagram alur, infografis, uraian singkat, dan korelasi antar kategori adalah beberapa cara penyajian data dapat dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, teks narasi merupakan cara dalam menyajikan data yang paling umum. Jika data ditampilkan, diharapkan akan memudahkan pembuatan rencana kerja selanjutnya dalam penelitian.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam penelitian data kualitatif, menurut Miles dan Huberman adalah merumuskan dan mengkonfirmasi kesimpulan. Hasil awal dapat direvisi jika tahap pengumpulan data selanjutnya gagal menghasilkan bukti yang meyakinkan. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut, kesimpulan awal atau hipotesis dapat divalidasi asalkan didukung oleh data yang akurat dan konsisten. Hasil yang dihasilkan dari penelitian kualitatif bisa saja menjawab rumusan masalah yang dibuat di awal, karena permasalahan dan rumusan masalah tersebut masih bersifat sementara dan bisa juga berubah setelah dilakukan penelitian di lapangan.²³

1.7.8 Keabsahan Data

Dalam penelitian, pemeriksaan keabsahan data sering kali terutama difokuskan pada uji validitas dan reliabilitas. Valid, reliabel, dan objektivitas merupakan syarat utama dalam penelitian kuantitatif. Adapun tingkat ketepatan antara data hasil penelitian yang didapat oleh peneliti disebut dengan validitas. Data yang “tidak berbeda” atau asli antara fakta yang terjadi pada objek penelitian dianggap valid atau sah.

Triangulasi digunakan dalam konteks pengujian kredibilitas digambarkan sebagai verifikasi data dari banyak sumber-sumber yang beragam baik dari segi teknik pengumpulan data maupun periodenya. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik adalah dua bentuk triangulasi yang digunakan.

²³ *Ibid*, hlm 247-252

a. Triangulasi dengan sumber

Dengan memverifikasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, triangulasi sumber digunakan untuk menilai keandalan data.

b. Triangulasi dengan Teknik

Triangulasi dengan teknik digunakan untuk menguji tingkat kredibilitas data. Misalnya, informasi yang dikumpulkan dari wawancara kemudian diverifikasi melalui kuesioner, dokumentasi, atau observasi. Peneliti juga dapat melakukan diskusi tambahan dengan pihak sumber data terkait maupun pihak lain untuk memantapkan keakuratan data bila ketiga metode penilaian data memberikan kesimpulan yang berbeda. Atau, mengingat keragaman sudut pandang, bisa jadi semuanya benar.